

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh kesejahteraan masyarakat, ketidakpatuhan regulasi, dan sistem pengendalian intern terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan per kapita terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh ketidakpatuhan regulasi terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh sistem pengendalian intern dengan indikator kelemahan SPAP, kelemahan SPPAPB, dan kelemahan StPI terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian “Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Ketidakpatuhan Regulasi, dan Sistem pengendalian intern terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Ini adalah opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia periode 2009-2013. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pengaruh kesejahteraan

masyarakat, ketidakpatuhan regulasi, dan sistem pengendalian intern terhadap opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Semiawan, 2010: 1). Metode penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan angka dan skor sebagai indikator variabel penelitian. Penelitian ini menganalisis 4 (tiga) variabel yang terdiri dari 1 (satu) variabel dependen dan 3 (tiga) variabel independen. Penelitian dilakukan dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Badan Pemeriksa Keuangan (IHPS BPK), Katalog BPS Indeks Pembangunan Manusia dan Katalog BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha.

D. Populasi dan Sampling atau Jenis dan Sumber Data

Populasi merupakan seluruh karakteristik yang menjadi objek penelitian yang berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti (Sarjono & Julianita, 2011). Populasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia periode 2009-2013.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu menurut Suharyadi (2009: 17) merupakan teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan atau kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Provinsi yang memiliki data lengkap dalam Katalog BPS Indeks Pembangunan Manusia dan Katalog BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha.
- 2) Provinsi yang telah mendapat opini audit dan data hasil pemeriksaan lengkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK periode 2009 sampai dengan semester 1 periode 2013.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

a. Definisi Konseptual

Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (UU Nomor 15 Tahun 2004).

b. Definisi Operasional

Dalam variabel ini, Peneliti menggunakan skoring sebagai pengukuran dari opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Adzani dan Martani (2014) dan Haryadi

(2010). Skoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka 1 sampai 5 dengan keterangan peringkat dan nilai sebagai berikut:

Tabel III.1

Peringkat Opini Audit

Jenis Opini	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian	5
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas	4
Wajar Dengan Pengecualian	3
Tidak Wajar	2
Tidak Memberikan Opini	1

2. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kebebasan dalam memilih dan dapat mengendalikan kehidupannya, dimana masyarakat memiliki kesadaran dasar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta dapat berpartisipasi dalam organisasi di kehidupannya (Sen, 2001).

Tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat terwujud dengan dukungan dan peran serta masyarakat yang sejahtera sebagai salah satu karakteristiknya, dimana masyarakat terlibat dalam pembuatan keputusan secara langsung maupun tidak langsung (Mardiasmo 2009; 18). Tercapainya kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan kualitas tata kelola dan

pengelolaan keuangan karena masyarakat akan lebih independen, aktif, dan kritis dalam mengawasi pengelolaan keuangan (Adzani & Martani, 2014). Indikator kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatan per kapita.

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

a. Definisi Konseptual

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks kinerja pembangunan yang berperan sebagai acuan keberhasilan pembangunan dan acuan dalam memperdalam pemahaman mengenai proses pembangunan yang sedang berjalan (Arsyad, 2010: 49). Masyarakat dalam suatu daerah yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan dapat berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan, dimana indeks pembangunan manusia merupakan sebagai salah satu indikator tingkat pembangunan manusia yang dapat mencerminkan kualitas kehidupan masyarakat (Adzani & Martani, 2014).

b. Definisi Operasional

Indeks Pembangunan Manusia merupakan sebuah nilai dalam skala 0 sampai 1 yang mengukur pencapaian pembangunan melalui indikator standar kehidupan yang layak yaitu pengeluaran per kapita, pendidikan yaitu tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan kesehatan yaitu angka harapan hidup (Todaro dan Smith, 2012: 54). Terdapat empat kelompok Indeks Pembangunan Manusia sesuai dengan nilai yang

dihasilkan dari perhitungannya, yaitu kelompok IPM rendah (0 sampai 0,50), kelompok IPM menengah bawah (0,50 sampai 0,66), kelompok IPM menengah atas (0,67 sampai 0,79), dan kelompok IPM tinggi (0,80 sampai 1,0) (Arsyad, 2010: 46). Penelitian ini menggunakan hasil perhitungan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Pendapatan per Kapita

a. Definisi Konseptual

Pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita merupakan indikator kegiatan ekonomi penduduk dan sebagai indikator kinerja perkenomian secara keseluruhan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu Negara (Arsyad, 2010: 32). Menurut Mankiw (2004: 502), pendapatan per kapita dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto riil (Produk Domestik Regional Bruto) yang menetapkan tahun dasar untuk menghitung pendapatan per kapita sehingga tidak terpengaruh oleh perubahan harga untuk melihat perkembangan dari tahun ke tahun.

b. Definisi Operasional

Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan logaritma natural pendapatan per kapita yang diambil dari PDRB per kapita masing-masing provinsi, dimana semakin sejahtera masyarakat maka masyarakat tidak lagi berkebutuhan hanya berkebutuhan pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder dengan adanya pendapatan yang mencukupi sehingga mereka lebih

memiliki fokus perhatian kepada pemerintahnya, serta lebih lantang dalam menyuarakan pendapat dan memberikan aspirasi (Adzani dan Martani, 2014).

Pendapatan per kapita = Logaritma natural PDRB per kapita

2.2 Ketidakpatuhan Regulasi

a. Definisi Konseptual

Ketidakpatuhan dapat diartikan sebagai pembangkangan atau indisciplin, dimana disiplin merupakan perilaku yang terkait dengan ketaatan dan ketertiban terhadap hukum, peraturan, dan tata tertib (Endarmoko, 2006:158). Ketidakpatuhan regulasi dapat berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan sehingga mengakibatkan adanya salah saji material (Peraturan BPK No.1 tahun 2007). Jadi, ketidakpatuhan regulasi merupakan perilaku ketidaktaatan atau ketidaktertiban terhadap hukum, peraturan, dan tata tertib yang berlaku.

b. Definisi Operasional

Ketidakpatuhan regulasi dalam penelitian ini diukur dengan nominal temuan pemeriksaan yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan regulasi, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adzani dan Martani (2014). Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari temuan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menggambarkan ketidakpatuhan terhadap peraturan-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian Negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan

administrasi, ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan (Fatimah et al, 2014).

Ketidakpatuhan regulasi = Logaritma natural nominal temuan audit atas ketidakpatuhan regulasi

2.3 Sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh semua personel entitas yang didesain dan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi (Standar Profesional Akuntan Publik: PSA No.69 SA Seksi 319). Sistem pengendalian intern yang memadai akan dapat mengenali dan mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK, 2014: 3). BPK mengelompokkan kelemahan tersebut menjadi kelemahan SPAP, kelemahan SPAPB, dan kelemahan StPI.

Tingkat implementasi sistem sistem pengendalian intern yang rendah yang menunjukkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern (Fatimah et al, 2014). Sistem pengendalian intern dalam penelitian ini diukur menggunakan kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2.3.1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

a. Definisi Konseptual

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan merupakan kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi karena tidak

memadainya sistem pengendalian intern terkait dengan kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa (IHPS BPK, 2013: 3).

b. Defisini Operasional

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan ditemukan dari adanya pencatatan atau pencatatan yang dilakukan tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, keterlambata entitas dalam menyampaikan laporan keuangan, tidak memadainya sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia pendukungnya (Atyanta, 2013). Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP) yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2.3.2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

a. Definisi Konseptual

Merupakan kelemahan sistem pengendalian intern yang diakibatkan tidak memadainya sistem pengendalian intern yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara atau daerah, serta pelaksanaan program dan kegiatan pada entitas yang diperiksa (IHPS BPK, 2013: 3).

b. Defisini Operasional

Kelemahan sistem pengendalian intern yang terkait dengan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja ditemukan dari tidak memadainya perencanaan kegiatan, ketidaksesuaian mekanisme dalam mengurus penerimaan Negara dan hibah, pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD, tidak tepatnya atau tidak dilaksanakannya kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan Negara dan peningkatan biaya/belanja, serta kelemahan pengelolaan aset barang milik daerah (Atyanta, 2013). Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dalam penelitian ini diukur dengan jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (SPPAPB) yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2.3.3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

a. Definisi Konseptual

Kelemahan struktur pengendalian intern merupakan wujud tidak memadainya sistem pengendalian intern yang terkait dengan ada atau tidaknya struktur pengendalian intern atau efektivitas atau tidaknya struktur pengendalian intern yang terdapat dalam entitas (IHPS BPK, 2013: 3).

b. Defisini Operasional

Adanya pemisahan tugas yang memadai dan otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas merupakan salah satu pengendalian dalam

struktur suatu entitas (Elder, 2011: 326). Dalam penelitian ini, kelemahan struktur pengendalian intern diukur dengan jumlah kasus kelemahan struktur pengendalian intern (StPI) yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel III.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kesejahteraan Masyarakat (Variabel X1)	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Pendapatan per Kapita (Logaritma natural dari PDRB per kapita)	Rasio
Ketidakpatuhan Regulasi (Variabel X2)	Logaritma natural nominal temuan audit atas ketidakpatuhan regulasi.	Rasio
Sistem pengendalian intern (VariabelX3)	Kasus kelemahan sistem pengendalian intern terdiri dari: 1. Kasus Kelemahan SPAP 2. Kasus Kelemahan SPPAPB 3. Kasus Kelemahan StPI	Rasio
Opini Audit LKPD (Variabel Y)	Opini audit diukur dengan skor 1 sampai 5 untuk setiap opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Ordinal

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan teknik perhitungan statistik. Analisis data dalam penelitian

ini diperoleh menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu program pengolahan data statistik SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi (Suharyadi, 2009: 4). Hal ini dilakukan untuk memperjelas karakteristik data yang digunakan dalam penelitian.

2. Analisis Regresi Ordinal Logistik

Regresi logistik dilakukan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya (Ghozali, 2011: 333). Skala ordinal adalah angka yang diberikan dimana angka tersebut mengandung pengertian peringkat (Suharyadi, 2003: 12).

Jika kategori variabel dependen berupa peringkat (ordinal), seperti peringkat 1 sampai 5 yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel dependennya yaitu opini audit, maka analisis logistik yang digunakan adalah regresi ordinal (Yamin dan Kurniawan, 2009: 117). Rumus persamaan regresi logistik ordinal yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

$$\text{Logit}(p_1) = \text{Log} \frac{p_1}{1 - p_1} = \alpha_1 + \beta'X$$

$$1 - p_1$$

$$\text{Logit}(p_1 + p_2) = \text{Log} \frac{p_1 + p_2}{1 - p_1 - p_2} = \alpha_1 + \beta'X$$

$$1 - p_1 - p_2$$

$$\text{Logit}(p_1 + p_2 + \dots + p_k) = \text{Log} \frac{p_1 + p_2 + \dots + p_k}{1 - p_1 - p_2 - \dots - p_k} = \alpha_1 + \beta'X$$

$$1 - p_1 - p_2 - \dots - p_k$$

$$\text{Logit } (p_1+p_2+\dots+p_k) = \alpha_1 + \beta_1\text{IPM} + \beta_2\text{LnPDRB} + \beta_3\text{LnTA} + \beta_4\text{SPAP} + \beta_5\text{SPPAPB} + \beta_6\text{StPI}$$

Keterangan:

P = Probabilitas peringkat opini audit

α = *estimated*

β_{0-6} = *intercept*

IPM = Variabel independen Indeks Pembangunan Manusia

LnPDRB = Variabel independen Pendapatan per Kapita

LnTA = Variabel independen Ketidakpatuhan Regulasi

SPAP = Variabel independen Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

SPPAPB = Variabel independen Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

StPI = Variabel independen Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

3. Pengujian Hipotesis

Analisis data dalam penelitian ini dijelaskan melalui beberapa pengujian sebagai berikut:

3.1. Menilai Model Fit

Pengujian ini dilakukan dengan melihat hasil Chi square untuk menerangkan apakah dengan memasukan variabel independen dalam model akan memberikan kontribusi pada model. Jika hasil pengujian menunjukkan penurunan nilai Chi-Square dan Log Likelihood, serta signifikansi pada taraf nyata 5%, maka adanya pemasukan variabel

independen dalam model memberik kontribusi pada model tersebut (Yamin dan Kurniawan, 2009: 122).

3.2. Menilai *Goodness of Fit*

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan kesesuaian model dengan data empiris, dengan melihat nilai *Goodness of Fit* Pearson dan Deviance yang menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok dengan model (Ghozali, 2011: 361). Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

Ho : Model yang dihipotesakan fit dengan data

HA : Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data

Jika hasil nilai statistik *goodness of Fit Test* Pearson dan Deviance sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak. Artinya ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model tidak fit. Namun jika nilai statistik *Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05, maka model tersebut mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima atau fit dan layak digunakan (Yamin dan Kurniawan, 2009: 122).

3.3. Menilai Pseudo R-Square

Pengujian ini dilakukan untuk melihat variabilitas variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independennya (Yamin dan Kurniawan, 2009: 122). Pseudo R-Square dilihat dari nilai Cox dan Snell R Square dan Nagelkerke R square.

Cox dan Snell R Square merupakan ukuran yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1

sehingga sulit diinterpretasikan, sementara Nagelkerke R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell R square yang menjelaskan (Ghozali, 2011: 341).

3.4. Uji *Parallel Lines*

Uji *parallel lines* digunakan untuk menguji asumsi bahwa setiap kategori memiliki parameter yang sama atau hubungan antara variabel independen dengan logit adalah sama untuk semua persamaan logit. Nilai hasil yang diharapkan dari pengujian ini adalah $p > 0.05$ yang menunjukkan *link function* logit yang dipilih telah sesuai. Adanya hasil nilai < 0.05 menunjukkan ketidakcocokan model yang dapat disebabkan oleh kesalahan dalam memilih *link function* (Yamin dan Kurniawan, 2009: 122).

3.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat *parameter estimates* yang menunjukkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Jika nilai signifikansinya < 0.05 , maka hal tersebut menunjukkan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Yamin dan Kurniawan, 2009: 123).